

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Christine Diah Wahyuningsih
Chrisayudia@yahoo.com
Dosen Fisip Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Semarang

Abstract

Development was generally directed at developing local wisdom values and attitudes to society that were more conducive for renewal, development, and fostering of the nation. In this case, including the development of productive business enthusiasm motivation. Far more important than that, a process of maturing society could be developed through guidance and encouragement and the presence of energy. Development actually included two main elements; namely, first, the issue of the material to be delivered and shared, and second, the issue of the individual who stepped up to the plate and became the human developer. Therefore development must ultimately be aimed at human development and humans who were built are creative humans and to be creative, humans must feel happy, safe, and free from fear.

The success of regional development depended on the regional head seeing the potential in his area and responding to the local wisdom of the local government. When the central government was determined to carry out development in the regions but the regional governments were not enthusiastic, the development will proceed slowly. If local governments were enthusiastic, the development in their regions would run smoothly. Therefore, the Central Government appreciated to local governments for taking the initiative to carry out development.

This local wisdom started from development at the village government level, meaning that when the village was given the opportunity, the village would be able to reduce the gap in Indonesia, because the poverty area was in the village.

Keywords: Local Wisdom, Development, Region, Village Development

Abstrak

Pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Jauh lebih penting dari hal itu adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi. Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; yaitu pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangun. Oleh karena itu pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia dan manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Keberhasilan pembangunan daerah tergantung kepala daerah melihat potensi di wilayahnya dan menyikapi kearifan lokal pemerintah daerah. Ketika pemerintah pusat bertekad melakukan pembangunan di daerah tetapi pemerintah daerah tidak antusias, maka pembangunan akan berjalan lambat. Tetapi bila pemerintah daerah antusias, maka pembangunan akan berjalan. Oleh karena itu Pemerintah Pusat mengapresiasi pemerintah daerah yang berinisiatif melakukan pembangunan.

Kearifan lokal ini mulai dari pembangunan di tingkat pemerintah desa, artinya ketika desa diberi kesempatan, desa akan mampu mengurangi kesenjangan di Indonesia, karena kantong-kantong kemiskinan itu ada di desa.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Pembangunan, Daerah, Pembangunan Desa.

A. Pendahuluan

Konsep pembangunan melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, dalam artian bahwa pembangunan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan dengan harapan terjadinya perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya melalui perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi, 2011). Pembangunan pada awalnya dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi, artinya sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan apabila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi dan yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai kearifan local dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun.

Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat. Demikian juga kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia (Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007) mengemukakan adanya tahapan- tahapan sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuha
2. Pertumbuhan dan distribusi
3. Teknologi tepat guna
4. Kebutuhan dasar
5. Pembangunan berkelanjutan dan
6. Pemberdayaan

Menurut Rostow tranformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan yang dilalui oleh semua neagara. Rostow mengemukakan lima tahap yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya; yaitu;

1. Masyarakat teradisional adalah masyarakat yang belum mengetahui teknologi modren, tetapi masih mengandalkan tenaga fisik. Sektor utamanya masih berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan peternakan.
2. Persiapan menuju tingkat landas merupakan masyarakat yang mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modren untuk menuju negara industri.
3. Tinggal landas merupakan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan disektor industri.
4. Masyarakat dewasa merupakan masyarakat menggunakan teknologi modren untuk melakukan semua aktivitas ekonominya.
5. Masa tingginya komsumsi masyarakat merupakan masyarakat memiliki tingkat komsumsi yang tinggi untuk produksi barang dan jasa.

Untuk menjadi negara dengan masyarakat yang tingkat pembangunannya lebih baik maka ada tahapan-tahapannya, menurut Moeljarto Tjokrowinoto memberikan dekripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat Manusia:

Pertama, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.

Kedua, fokus utama adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang

terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ketiga, pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi lokal

Keempat, didalam melaksanakan pembangunan , pendekatan ini menekankan pada proses sosial learning yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar.

Kelima, proses pembentukan jejaringan (networking) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satu-satunya organisasi tradisional yang mandiri , merupakan bagian yang integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka megidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan anatar struktur vertikal maupun horizontal, melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiosis antara struktur-struktur pembagunan di tingkat lokal.

Dasar interprestasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis, karena itu pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatam keputusan tentang berbagai hal yang

memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan pengabdian ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi , negara dengan masyarakat.

Dari penjelasan elemen-elemen diatas maka muncullah teori pemberdayaan (*empowerment*) yang diapandang sebagai pemaknaan alternatif terhadap pembangunan.

Untuk mewujudkan delapan kondisi utama di atas , Mahbub Ul Haq (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013), menawarkan tiga komponen penting dalam pembangunan manusia yaitu:

1. Kesetaraan dalam memperoleh kesempatan (*Equal Access To Oportunity*).
2. Berkelanjutan (*Sustainability*) dipahami bahwa generasi yang akan datang harus bisa menikmati kesempatan yang sama dengan generasi sekarang.
3. Produktifitas (*Produktivity*) hal ini dibutuhkan investasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan set-up ekonomi makro untuk memfasilitasi pengembangan SDM.
4. Pemberdayaan (*Empowerment*) yang diterjemahkan bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk kepentingan sendiri, sehingga mereka harus bisa mempengaruhi keputusan yang terkait dengan hidup mereka.

Logika yang dominan dari pradigma ini adalah suatu ekologi manusia yang seimbang , dengan sumber-sumber daya utama berupa sumber –sumber daya

informasi dan prakarsa kreatif yang tidak habis-habisnya dan yang tujuan utamanya adalah pertumbuhan manusia yang mendefenisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi-potensi manusia. Pradigma ini memberi peran kepada individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat kepada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat den kekhasan setempat. Menurut pendekatan ini, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang. Walaupun sederhana , tujuan ini sering terlupakan oleh keinginan untuk meningkatkan akumulasi barang dan modal. Banyak pengalaman pembangunan menunjukan bahwa kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidaklah terjadi dengan sendirinya.

Teori pembangunan dalam perkembangannya semakin kompleks dan semakin tidak terikat pada satu disiplin ilmu dinamika teori pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang bersifat terbuka. Pengalaman selama ini menunjukan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Pada sebagian komunitas, pembangunan

telah mengantar kehidupan mereka lebih baik bahkan ada sebagian yang dapat dikatakan berlebihan, sementara bagi komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan kesengsaraan. Oleh karena itu pemahaman masalah pembangunan hendaknya harus bersifat dinamis, karena setiap saat kan selalu muncul masalah-masalah baru yang harus dipecahkan oleh pembangunan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa akan selalu ada pemecahan atas setiap masalah, tetapi juga selalu ada masalah atas setiap pemecahan masalah. Keberhasilan pembangunan daerah di Indonesia tergantung kepala daerah melihat potensi di wilayahnya. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan di daerah tidak tergantung pada pemerintahan pusat melainkan kearifan lokasi pemerintah daerah. Ketika pemerintah pusat bertekad melakukan pembangunan di daerah tetapi pemerintah daerah tidak antusias, maka pembangunan akan berjalan lambat. Tetapi bila pemerintah daerah antusias, maka pembangunan akan berjalan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pembangunan infrastruktur kenektivitas memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Pusat mengapresiasi pemerintah daerah yang berinisiatif melakukan pembangunan. Mengutip pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengatakan kearifan lokal ini mulai dari pembangunan di tingkat pemerintah desa. Ketika diberi kesempatan, desa akan mampu mengurangi kesenjangan di Indonesia, karena kantong-kantong kemiskinan itu ada di desa. Pertumbuhan

ekonomi growth tanpa dibarengi pengurangan kemiskinan itu mustahil. Oleh karena itu kearifan local menjadi salah satu perhatian pentingn Indonesia Development Forum 2018 yang mendorong praktik baik di daerah menjadi contoh solusi pembangunan bagi daerah lain.

Indonesia Development Forum 2018 digagas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative. IDF 2018 mempunyai tema besar *Pathways to Trackle Regional Disaprities Across The Archipelago*. IDF 2018 mendorong percepatan pembangunan di Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan, berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan fakta. Hasilnya, akan digunakan untuk bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

B. Kearifan Lokal (Local Wisdom)

Istilah kearifan lokal dalam wacana kebangsaan semakin populer dalam satu dekade terakhir ini. Kajian tentang tema kearifan lokal semakin berkembang, karena kemunculan dan popularitasnya dalam masa setelah runtuhnya Orde Baru, istilah kearifan lokal da pat dilihat sebagai respon terhadap situasi baru yang muncul pada masa reformasi. Orientasi pembangunan dalam perspektif modernitas di masa Orde Baru dipertanyakan secara serius oleh banyak kalangan pada masa reformasi.

Bahkan, perspektif tersebut sering diklaim sebagai penyebab kemerosotan dan luntarnya nilai-nilai kebangsaan. Sebagai respon, konsep kearifan lokal yang berdasar pada kearifan-kearifan yang telah tumbuh berkembang dalam komunitas-komunitas bangsa di seantero nusantara diproyeksikan sebagai tawaran efektif untuk pengembangan wawasan kebangsaan di era reformasi. Wawasan kebangsaan dan pembangunan bangsa selanjutnya harus berdasarkan pada semangat hidup yang bersumber pada nilai-nilai sosial, agama, dan budaya masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan (Murniatmo, 2000).

Nilai bersifat ide atau abstrak (tidak nyata). Nilai bukanlah suatu fakta yang dapat ditangkap oleh indra. Tingkah laku perbuatan manusia atau sesuatu yang mempunyai nilai itulah yang dapat ditangkap oleh indra karena ia bukan fakta yang nyata. Nilai itu objektif jika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai; sebaliknya, nilai itu "subjektif" jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian, tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis ataupun fisis. (Risieri F., 2007)

Cita-cita pengembangan wawasan kebangsaan yang menyertakan kearifan lokal tentu saja bukan tanpa kendala. Gempuran globalisasi dan modernisasi, di mana hampir setiap *stakeholder* adalah pelakunya, telah begitu lama dan menguat, dan bagi beberapa kalangan, telah mengikis tradisi-tradisi (kearifan)

lokal (Priyono 2003, Kartono 2004). Kearifan lokal bagai barang hilang, lalu dicari kema-na-mana, dan tinggal serpihan-serpihannya yang bisa ditemukan. Itupun sudah tercemari atau "cacat" baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kearifan lokal seringkali disinonimkan dengan kekolotan, keprimitifan, dan keirasionalan. Para pengikutnya kemudian menjadi segan mengusungnya. Dari sisi eksternal, modernitas selalu tampil lebih kuat, meyakinkan, dan menjanjikan. Ia hadir tidak hanya membawa tawaran baru, tapi sekaligus ancaman terhadap sesuatu yang lama. Kehadirannya yang sudah begitu lama berpengaruh besar pada keberlanjutan tradisi-tradisi lokal. Sebenarnya, tradisi lokal dan modernitas tidak harus selalu berbenturan dan saling mencela. Keduanya bisa rujuk dan berelasi secara produktif (Lewinson 2006, Whitten 2008, Alia 2010). Situasi sekarang, di mana benturan antara keduanya tak terelakkan, justru menuntut pengelolaan secara bijak sehingga bisa lebih produktif. Tradisi lokal mustahil menolak modernitas, dan modernitas akan terus bertemu dengan lokalitas (Featherstone, Lash, & Roberstone 1995).

Memikirkan untuk mengadvokasi salah satu dan mencela yang lainnya sangat tidak produktif dan sia-sia, menurut seorang filsuf Amerika keturunan Afrika, Anthony K. Appiah (2006). Dengan menunjukkan observasinya pada kasus

transformasi sosial budaya di Afrika, Appiah berpendapat bahwa tradisi bisa hidup di samping modernitas. Subyek budaya di Afrika menunjukkan bahwa mereka dengan damai mengadopsi modernitas tanpa harus meninggalkan tradisi. Mereka dengan kapasitasnya masing-masing dengan bijak mampu menfilterisasi baik tradisi maupun modernitas. Appiah kemudian berpendapat bahwa tradisi (atau kearifan lokal dalam konteks kita) dan modernitas tidak perlu dipertentangkan seakan-akan keduanya secara esensial selalu saling bertolak belakang. Pendapat Appiah cukup menarik untuk diaplikasikan di Indonesia, khususnya dalam proyek pengembangan wawasan kebangsaan dan pembangunan nasional. Yang penting kemudian dilakukan di mana kehadiran modernitas tak terelakkan lagi, terutama untuk pengembangan wawasan kebangsaan dan pembangunan nasional adalah meramu keduanya dengan tujuan yang lebih produktif dan konstruktif: mensejahterahkan warga. Syaratnya tentu saja adalah bahwa pembangunan harus mempersepsikan masyarakat sebagai subyek dan obyek dan karenanya melibatkan mereka secara langsung dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan pembangunan nasional menjadi mutlak (Pasaribu & Simadjuntak 1982). Sampai pada poin ini, dapat dikatakan bahwa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kearifan lokal dapat tersaring sebagai salah satu sumber gagasan untuk pembangunan

nasional. Contoh di atas memang menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak ditanggapi. Tapi terdapatnya ruang untuk mengutarakan gagasan sudah merupakan poin penting. Jika kita mengingat sejarah relasi negara dengan masyarakat lokal, contoh kasus tersebut adalah sebuah kemajuan yang cukup signifikan. Sekalipun gagal jadi salah satu daftar usulan, gagasan kearifan lokal, karena punya ruang untuk diuraikan dan didiskusikan, cukup potensial untuk dijadikan sebagai konten, target, dan sekaligus landasan konsep pembangunan nasional. Kebijakan MUSRENBANG membuka peluang tersebut.

Perubahan kebijakan negara (dari Orde Baru ke regim Reformasi), misalnya dalam kebijakan Musrenbang telah mengubah persepsi warga terhadap negara, sebagaimana perubahan persepsi negara terhadap mereka. Contoh sebelumnya sudah menjelaskan bahwa pada masa reformasi masyarakat lokal telah merespon secara kebijakan Negara pro-aktif. Kebijakan Musrenbang oleh pemerintah bisa dijadikan sebagai instrumen pengembangan masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang dapat dikembangkan pada pembangunan nasional. Tetapi bahwa gagasan yang berupa bagian dari kearifan lokal seperti contoh di atas belum mendapat tanggapan positif, kebijakan Musrenbang yang secara teori cukup ideal, tetap punya masalah

dalam hal mempertimbangan kearifan lokal sebagai sarana dan target pembangunan nasional.

Apabila dicermati lebih jauh, masalah yang ada masih cukup kompleks. Sebagaimana contoh yang diurai sebelumnya, kegagalan mendapatkan tanggapan positif itu disebabkan karena (salah satunya) kearifan lokal belum dipahami. Mayoritas pemangku kebijakan tampaknya masih sangat menggandrungi wacana pembangunan modern tepatnya ideologi Orde Baru. Mereka masih belum mampu atau mau memahami signifikansi sistem-sistem tradisional yang telah hidup dan berkembang di masyarakat lokal apalagi menjadikannya sebagai bagian (baik sistem maupun konten) perumusan pembangunan komunitas. Hal inilah menjadi penyebab mengapa Musrenbang bisa diklaim belum berjalan maksimal. Dengan kata lain kegagalan Musrenbang karena terbatas pada pelibatan masyarakat dalam pengusulan. Padahal, dalam praktik *community building*, sekedar partisipasi masyarakat tidak cukup, tetapi anggota komunitas harus memainkan peran utama dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi-strategi untuk pengembangan diri mereka sendiri (empowerment). Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa inti dari *community building* adalah terbangunnya kerja bersama dengan masyarakat setempat dalam perumusan pandangan strategis untuk pengembangan komunitas dan berkonsentrasi pada kapasitas yang dimiliki oleh komunitas untuk

memecahkan bukan hanya masalah yang sedang dihadapi, tapi juga yang mungkin muncul kemudian.

Mereka juga menegaskan bahwa kerjasama dimulai dengan mengembangkan sebuah pemahaman masalah dan tantangan, mendengarkan semua pihak yang terlibat dan yang berkepentingan dan dalam perumusan solusi, kemampuan/kekuatan yang ada dalam komunitas adalah fokus utama untuk merajut fondasi dalam setiap rencana dan program baru, prinsip-prinsip pembangunan komunitas inilah yang terabaikan dalam kebijakan Musrenbang. Lebih jauh, kegagalan kebijakan Musrenbang yang melibatkan kearifan lokal, karena keterbatasan alokasi dana atau anggaran, usulan harus disaring untuk menemukan yang paling urgen: mana yang paling prioritas. Namun, usulan yang akan dibawa pada level yang lebih tinggi dalam struktur negara pengambil kebijakan harus yang paling diprioritaskan, sehingga yang sering terjadi, saringan usulan hanya menyisakan satu atau dua. Musrenbang desa (level paling bawah, di mana masyarakat boleh menginventarisir ide-ide sebagai bagian dari aspirasi warga, tapi usulan yang sampai pada level kecamatan harus tinggal satu. Pada level kecamatan, usulan dari desa yang telah diprioritaskan harus bersaing dengan desa lain. Dari usulan desa - desa di kecamatan kembali digodok atau dipangkas sebelum dibawa

ke kabupaten. Usulan beberapa desa sudah ada yang harus terpangkas di level ini. Ketika sampai di kabupaten, hanya desa tertentu yang mendapat prioritas.

Nasib kebijakan Musrenbang yang awalnya ia menyejukkan bagi kearifan lokal menciptakan kekecewaan baru dan banyak anggapan bahwa Musrenbang tidak lebih dari sekedar komoditi politik untuk kepentingan politik pemerintah dan bukan untuk kepentingan rakyat. Artinya dengan Musrenbang, negara menunjukkan bahwa Negara telah mengikut sertakan warga negara, termasuk masyarakat local dalam pembangunan nasional sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pemerintah berhasil menunjukkan bahwa negara versi Reformasi telah berpihak pada rakyat. Sementara rakyat, khususnya masyarakat lokal (pedesaan) tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan dalam pengembangan komunitas pedesaan berdasarkan kearifan local yang dimiliki. Banyak kasus terkait Musrenbang menjadikan masyarakat apatis dalam rapat-rapat untuk menginventarisir usulan - usulan warga sudah membosankan dan ekspektasi dari Musrenbang tak pernah ada realisasinya.

C. Kecocokan Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Kearifan lokal secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat adapun kecocokannya dalam berbagai dimensi pembangunan

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu sintesa budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehingga berpengaruh sebagai motorik untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokalnya. Berdasarkan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dapat dipahami dari tiga karakteristik:

1. Keberadaan [pemerintah](#) daerah itu harus merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan memiliki organisasi sendiri serta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Memiliki [kewenangan](#) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau juga sering ditafsirkan memiliki [pemerintahan](#) sendiri itu dicerminkan dengan dimilikinya satu Badan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak-pihak di luar organisasi [pemerintahan](#) daerah.

Konten dan Konteks sebuah Kebijakan Publik adalah untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dalam artian kebijakan publik sebagai aturan. Kebijakan publik secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang dipilih untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah (*Whatever government chooses to do or not to do*, Thomas R

Dye, 1975). Pemerintah tidak mengerjakan sesuatu pun termasuk dalam kategori kebijakan, karena hal itu merupakan sebuah keputusan dengan pertimbangan dampak yang lebih buruk akan muncul apabila kebijakan diambil. Hal menunjukkan bahwa kebijakan publik sangat dominan dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan (*policy environment*). Dalam sistem demokrasi apabila sistem politiknya tidak mampu mengembangkan kebijakan publik yang baik tidak berarti, karena kebijakan publik adalah output dari proses politik antara legislatif dengan eksekutif dalam sistem politik. Kebijakan publik adalah bentuk riil dari politik yang terkait dengan pemerintah, karena hanya pemerintahlah yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur masyarakat dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum (*public service*). Kewenangan untuk mengatur masyarakat hanya dimiliki oleh pemerintah, biasanya diatur dalam hukum dasar sebuah negara.

Pada hakekatnya, kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan masyarakat, agar kehidupan masyarakat teratur, tertib dan sejahtera berdasarkan aturan yang jelas. Kewenangan pemerintah melalui kebijakan publik meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan memiliki kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. (memiliki hak Otoritatif). Kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan strategis, oleh karena itu berfungsi sebagai pedoman

umum untuk keputusan-keputusan khusus di bawahnya. Dalam masyarakat modern, partisipasi masyarakat dalam politik dan urusan pemerintahan sudah menjadi bagian kehidupan bermasyarakat dan rakyat menyadari bahwa urusan pemerintahan bukan urusan orang lain tetapi juga urusan mereka, karena mereka turut memilih para wakil rakyat (untuk legislatif) dan juga memilih kepala daerah melalui Pilkada langsung. Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan sangat dibutuhkan agar mereka dapat memperjuangkan aspirasinya dan menuntut haknya secara proporsional yang prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa sampai nasional. Partisipasi politik masyarakat dalam proses kebijakan publik bertujuan mempengaruhi proses kebijakan pemerintah agar tidak menimbulkan dampak buruk pada masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang arti dan pentingnya kebijakan publik bagi masyarakat diharapkan dapat menghindari dan mengendalikan tindakan masyarakat secara konstitusional dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka meningkatkan kualitas demokrasi.

D. Penutup

Sebagai alternatif, mengatasi kegagalan Musrenbang adalah *community building* yang tepat diterapkan adalah yang menitik beratkan pentingnya modal

sosial dan partisipasi aktif warga sebagai sarana dan sekaligus tujuan/target pembangunan nasional. Dengan menjadikan ritual sebagai sarana dan target pembangunan, partisipasi aktif warga masyarakat lokal dan strategi pelayanan umum; pembangunan kapasitas lokal dalam pemecahan masalah dan pembentukan relasi antara komunitas dan institusi kebijakan. integrasi kepentingan masyarakat lokal dalam kesempatan yang ditawarkan oleh Negara pe ngelolaan secara terbuka dan kongkrit isu -isu terkait dengan kesukuan, agama dan tradisi lokal, termasuk tantangan dan peluangnya dalam pengembangan komunitas; pengakuan nilai -nilai yang hidup dalam dalam masyarakat, termasuk aset mereka seperti modal sosial.

Prinsip *community building* inilah yang lebih efektif untuk mengikutsertakan kearifan lokal dalam pengembangan wawasan dan pembangunan nasional. Kearifan tradisi lokal yang mencakup nilai-nilai budaya dan agama dan sistem politik dan ekonomi harus jadi bagian penting dalam pengembangan wawasan dan pembangunan nasional. P. emerintah dalam perumusan dan pengambilan kebijakan serta implementasi kebijakannya menerapkan prinsip ini karena kebijakan negara pada prinsipnya adalah proses *community building*.

BAHAN BACAAN

- Baidhawi Z (ed) (2003) Agama dan Pluralitas Budaya Lokal. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Carnegie M (2008) Development prospects in eastern indonesia: Learning from Oelua's diverse economy. Asia Pacific Viewpoint 49(3):354-469.
- Kartono DT (2004) Orang Boyan Bawean: Perubahan Lokal dalam Transformasi Global. Purwakarta: Pustaka Cakara Purwakarta.
- Koentjaraningrat (1993) Membangun Masyarakat Terasing. Dalam: Koentjaraningrat (ed). Masyarakat Terasing di Indonesia. Jakarta: Gramedia and Departemen Sosial. 344–350.
- Li TM (2001) Masyarakat adat, difference, and the limits of recognition in Indonesia's forest zone. Modern Asian Studies 35(3):645-676.
- Maarif S (2012a) Dimensions of Religious Practice: The Ammatoans of Sulawesi, Indonesia. Dissertation, Arizona State University, Tempe.
- Maarif S (2012b) Sharing: A Religious End of Economic Practice among Ammatoans. The Winner of the Essay competition by Globalethics, Indonesia: ICRS-UGM Yogyakarta, May 2012.
- Maula MJ (2000) Ngesuhi Deso Sak Kukuban: Lokalitas, Pluralisme, Modal Sosial Demokrasi. Yogyakarta: LKiS.
- Murniatmo G (2000) Khazanah Budaya Lokal: Sebuah Pengantar untuk Memahami Kebudayaan Daerah di Nusantara. Jakarta: Adicita.
- Nurcholis H & Herfan D (2009) Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Pasaribu IL & Simadjuntak B (1982) Sosiologi Pembangunan. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Purwadi (2005) Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

- Rachmadi S (1990) Pembinaan Masyarakat Terasing di Indonesia. Jakarta: Departemen Sosial.
- Sholahuddin M (2008) Mengenal Kearifan Lokal di Klepu-Ponorogo: Praktik Hubungan Sosial Lintas Agama dan Mekanisme Pencegahan Konflik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryadinata L (1997) Democratization and Political Succession in Suharto's Indonesia. *Asian Survey* 37(3):269-280.
- Tjiptoherijanto P & Nagib L (2008) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Di antara Peluang dan Tantangan. Jakarta: LIPI Press.
- Wibowo AH (2009) Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus di Kecamatan Pemasang Kabupaten Pemasang). Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Woodward MR (2001) Indonesia, Islam, and the prospect for democracy. *SAIS Review* 21(2).
- Yamashita S (1994) Manipulating ethnic tradition: the funeral ceremony, tourism, and television among the Toraja of Sulawesi. *INDONESIA* 58(4):69-82.